

FOREIGN EXCHANGE RATES.

KK  
A. 201/01  
Wij  
p

**PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN TERHADAP LABA/RUGI  
SELISIH KURS ATAS TRANSAKSI VALUTA ASING  
PADA PT XYZ SURABAYA  
PERIODE 1997 - 1998**

**SKRIPSI**

**DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN  
DALAM MEMPEROLEH GELAR SARJANA EKONOMI  
JURUSAN AKUNTANSI**



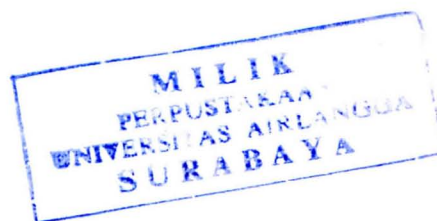
**DIAJUKAN OLEH :  
TRI WIJATMIKO  
NO. Pokok : 049923061 / E**

**KEPADA  
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2001**

**SKRIPSI**

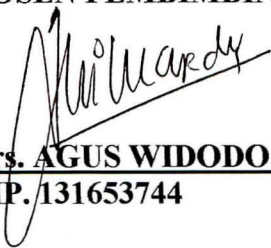
**PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN TERHADAP LABA/RUGI  
SELISIH KURS ATAS TRANSAKSI VALUTA ASING  
PADA PT XYZ SURABAYA  
PERIODE 1997 – 1998**

**DIAJUKAN OLEH  
TRI WIJATMIKO  
No. Pokok: 049923061/E**



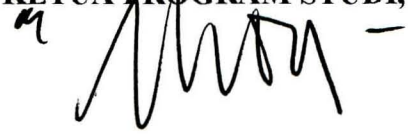
**TELAH DISETUJUI DAN DITERIMA DENGAN BAIK OLEH**

**DOSEN PEMBIMBING,**

  
**Drs. AGUS WIDODO MARDIJUWONO, MSi, Ak.**  
**NIP. 131653744**

**TANGGAL.....** 27/07 - 2001

**KETUA PROGRAM STUDI,**

  
**Dr. ARSONO LAKSMANA, SE, Ak.**  
**NIP. 130783542**

**TANGGAL.....** 27/07/2001

## ABSTRAKSI

Krisis moneter yang melanda Indonesia mulai pertengahan Juli 1997 yang sampai saat ini belum selesai telah mempengaruhi sendi-sendi ekonomi nasional. Mata uang rupiah yang terdepresiasi hingga lebih dari 100% disertai dengan *slow down* pertumbuhan ekonomi membuat *ability to pay tax* pengusaha menurun. Sebenarnya dalam Undang-undang No. 10 Tahun 1994 telah diatur ketentuan mengenai laba/rugi selisih kurs, namun karena depresiasi rupiah yang sangat besar membuat para pengusaha terkena imbas rugi selisih kurs meski ada juga yang untung. Oleh karena itu pemerintah (fiskus) menerbitkan Kep. Menkeu No. 449/KMK.04/1997 dan diganti dengan Kep. Menkeu. No. 597/KMK.04/1997, serta berbagai surat Edaran Dirjen Pajak. Inti dari ketentuan tersebut adalah memberi opsi kepada Wajib Pajak untuk memilih apakah mengamortisasi kerugian kurs selama 5 tahun atau membebaskan seluruhnya pada tahun 1997.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena peneliti tidaklah memandang obyek studi sebagai entitas diluar dirinya, namun peneliti ikut menyelami sebagai bagian dari obyek studi, sehingga data yang diperoleh meliputi data primer dan data sekunder. Hal ini sangat penting untuk mendukung desain penelitian deskriptif studi kasus yang memerlukan multi sumber data. Mengacu pada desain ini penyajian bahasan dalam bentuk ilustratif namun pertanyaan permasalahan berkaitan dengan *how* dan *why* tetap akan terjawab. Prosedur komparatif digunakan untuk membandingkan fakta yang ditemukan dengan standar tertentu yakni ketentuan fiskal, dan dengan prosedur ini permasalahan "*why*" akan dideskripsikan.

PT XYZ memilih mengamortisasi rugi kurs tahun 1997 sebesar Rp.45.224.542.926,85 dan melakukan pembebanan atas sisa amortisasi kerugian selisih kurs tahun 1997 ke dalam tahun 1998, 1999, 2000 dan 2001 sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Dirjen Pajak No 54/PJ.42/1999. Dalam penelitian ini juga ditemukan bahwa PT XYZ menggunakan sistem pembukuan yang tidak taat azas karena pada tahun 1997 menggunakan sistem kurs tengah Bank Indoenesia, namun tahun 1998 beralih ke sistem kurs tetap. Jika alasan perubahan untuk *tax avoidance* tidak dibenarkan karena tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang No. 10 Tahun 1994 dan Kep. Menkeu. No. 597/KMK.04/1997. PT XYZ juga memasukkan kerugian kurs dari transaksi-transaksi yang seharusnya tidak boleh dibiayakan yaitu transaksi valuta asing *cash in bank*, dan hutang jangka panjang-leasing, karena tidak relevan dan tidak dibenarkan secara fiskal. Koreksi fiskal menyebabkan PT XYZ harus membayar pajak penghasilan dalam tahun pajak 1997 sebesar **Rp. 1.141.482.100,00** selisih **Rp. 1.344.900,00** lebih besar dari pada pajak penghasilan secara komersial dan harus membayar pajak penghasilan sebesar **Rp. 6.906.591.400,00** pada tahun pajak 1998, sementara secara komersial nihil.